



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR : 476 TAHUN 2020
T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) LUTHERAN OETUKE
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, telah diadakan visitasi dan uji petik kelayakan Ijin Penyelenggaraan terhadap Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Lutheran Oetuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Lutheran Oetuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada huruf (b) di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan Ijin Penyelenggaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) dan (c) diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Lutheran Oetuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor: 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1945).

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: B-1945/Kw.19.4/5/PP.00.3/02/2020 tanggal 21 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I.,
TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
AGAMA KRISTEN (SMAK) LUTHERAN OETUKE, KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR**
- KESATU** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan pada Sekolah Menengah Agama Kristen
(SMAK) Lutheran Oetuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Dengan diberikannya Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama
Kristen (SMAK) Lutheran Oetuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dalam menyelenggarakan proses
pendidikannya harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Lutheran
Oetuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT** : Setiap akhir semester Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Lutheran
Oetuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan
perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
- KELIMA** : Apabila Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Lutheran Oetuke,
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur lalai
melaksanakan diktum 4 (empat) diatas dapat mengakibatkan dicabutnya Ijin
Penyelenggaraan.
- KEENAM** : Setelah ditetapkan Ijin Penyelenggaraan dan telah mengikuti Ujian
Nasional, Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Lutheran Oetuke,
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur
diwajibkan menindaklanjuti Ijin Penyelenggaraan ini untuk proses
akreditasi atau reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

pada tanggal : 19 November 2020

DIREKTUR JENDERAL



THOMAS PENTURY